

PELAPORAN YANG BERKELANJUTAN DI ASEAN

Tingkat Kemajuan di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand 2015

Oleh Lawrence Loh, Nguyen Thi Phuong Thao, Isabel Sim, Thomas Thomas, Wang Yu
Oktober 2016



Centre for Governance, Institutions & Organisations
NUS Business School

DAFTAR ISI

Daftar Gambar	2
Daftar Tabel	2
Tentang <i>ASEAN CSR Network</i> (ACN)	3
Tentang CGIO NUS	3
Ringkasan Eksekutif	4
1. Pengantar	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Lingkup Penelitian	5
4. Lanskap Keberlanjutan di ASEAN	6
5. Metodologi	7
i. Menilai Tingkat Pengungkapan Berdasarkan Indikator GRI	7
ii. Pengungkapan Standar Umum	8
6. Temuan Antar-Negara	9
i. Laporan Karakteristik	9
ii. Keseluruhan Tingkat Pengungkapan	11
iii. Tingkat Pengungkapan Berdasarkan Indikator	12
iv. Tingkat Pengungkapan Berdasarkan Kerangka Kerja	13
v. Tingkat Pengungkapan oleh Perusahaan yang Berafiliasi dengan Pemerintah (<i>GLCs</i>) / Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	14
vi. Pengungkapan Standar Umum	14
7. Keterbatasan Penelitian	20
8. Kesimpulan	21
Referensi	22
Para Penulis	23
Penghargaan	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Jumlah perusahaan yang berkomunikasi secara berkelanjutan	9
Gambar 2:	Perantara komunikasi berkelanjutan antar negara	10
Gambar 3:	Jumlah perusahaan yang mengadopsi kerangka kerja GRI dan mencari jaminan eksternal	10
Gambar 4:	Tingkat pengungkapan di ASEAN	11
Gambar 5:	Tingkat pengungkapan menurut indikator	12
Gambar 6:	Tingkat pengungkapan menurut kerangka kerja	13
Gambar 7:	Tingkat pengungkapan oleh <i>GLC</i> /BUMN dan non- <i>GLC</i> / non-BUMN	14
Gambar 8:	Jumlah perusahaan yang memberikan pernyataan CEO terkait relevansi dari keberlanjutan	15
Gambar 9:	Jumlah perusahaan yang memberikan gambaran tentang dampak utama, risiko, dan peluang	15
Gambar 10:	Jumlah perusahaan yang menjelaskan tentang proses untuk mendefinisikan isi laporan dan batasan aspek	16
Gambar 11:	Jumlah perusahaan yang mencantumkan aspek material yang teridentifikasi	17
Gambar 12:	Jumlah perusahaan yang melaporkan batasan aspek untuk setiap aspek material di dalam dan di luar organisasi	17
Gambar 13:	Jumlah perusahaan yang mengungkapkan kebijakan dan prosedur keterlibatan pemangku kepentingan	18
Gambar 14:	Jumlah perusahaan yang menyediakan daftar kelompok pemangku kepentingan yang terlibat	19
Gambar 15:	Jumlah perusahaan yang melaporkan dasar indentifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Lanskap Keberlanjutan di ASEAN	6
Tabel 2:	Indikator dalam metodologi penilaian GRI	8
Tabel 3:	Pengungkapan standar umum	8

TENTANG ASEAN CSR NETWORK (ACN)

Sejalan dengan tercapainya komunitas ASEAN, *ASEAN CSR Network (ACN)* didirikan pada tahun 2011 melalui ASEAN Foundation dengan mandat untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility / CSR*) dimasukkan ke dalam agenda perusahaan dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan di Negara-negara Anggota ASEAN.

Sebagai organisasi regional, ACN menyediakan platform untuk jaringan dan kerjasama di tingkat ASEAN, mendukung kegiatan pengembangan kapasitas dan pelatihan, membantu menyatukan tindakan kolektif mengenai isu-isu kunci, dan menyediakan koneksi untuk bekerjasama dengan badan-badan regional dan internasional yang tertarik dalam mendukung kemajuan CSR di wilayah tertentu.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.asean-csr-network.org

TENTANG CGIO NUS

The Centre for Governance, Institutions, and Organisations (CGIO) didirikan oleh Sekolah Bisnis *National University of Singapore (NUS)* pada tahun 2010. CGIO NUS bertujuan untuk memelopori penelitian yang relevan dan berdampak besar pada isu-isu terkait pemerintahan yang berkaitan dengan Asia, mencakup tata kelola perusahaan, tata kelola perusahaan keluarga, perusahaan milik negara, kelompok bisnis, dan institusi. CGIO juga menyelenggarakan acara seperti kuliah umum, diskusi terbatas yang melibatkan para pelaku industri, dan konferensi akademis mengenai topik-topik yang berkaitan dengan pemerintahan.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.bschool.nus.edu.sg/cgio

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lingkungan yang amat cepat berkembang dan dinamis menciptakan tantangan bagi bisnis untuk mengurangi catatan pada operasi mereka yang mempengaruhi masyarakat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Akibatnya, terdapat peningkatan permintaan akan pengetahuan yang lebih baik dari para pemangku kepentingan mengenai bagaimana cara untuk menangani dan memasukkan dampak tersebut ke dalam strategi bisnis (Amran & Keat Ooi, 2014).

Pelaporan berkelanjutan membantu perusahaan mengungkapkan informasi mengenai aktivitas dan strategi tersebut. Terlebih lagi, hal ini memungkinkan mereka mengelola perubahan untuk mewujudkannya. Melalui pelaporan berkelanjutan, para pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang baik tentang bisnis yang mereka investasikan dan menjadi yakin bahwa perusahaan mengintegrasikan praktik berkelanjutan ke dalam operasi mereka.

Dengan adanya keuntungan-keuntungan ini, Jaringan Kerja CSR ASEAN (ACN), bekerja sama dengan *The Centre for Governance, Institutions, and Organisations (CGIO)* di Sekolah Bisnis NUS, melakukan studi di empat negara di Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengetahui keadaan pelaporan berkelanjutan di negara-negara ini. Negara yang termasuk dalam penelitian ini adalah Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Perkembangan dan tingkat pelaporan di masing-masing negara dipelajari dan kemajuan keseluruhan pelaporan di ASEAN dianalisis

Berikut adalah beberapa poin penting dari temuan yang telah diamati:

- 100 dari 100 perusahaan terpilih di Indonesia, Malaysia dan Thailand membahas tentang keberlanjutan. 71 dari 100 perusahaan di Singapura juga melakukannya.
- Thailand memiliki kualitas pengungkapan keberlanjutan tertinggi secara keseluruhan, yang ditunjukkan oleh tingkat pengungkapan yang tinggi, yakni 56.8¹, diikuti oleh Singapura (48,8), Indonesia (48,4), dan Malaysia (47,7).
- Indikator lingkungan, di antara empat indikator *Global Reporting Initiative (GRI)*, memiliki tingkat pengungkapan terendah di keempat negara.
- Mayoritas perusahaan menyampaikan tentang keberlanjutan dengan cara mengintegrasikan laporan keberlanjutan mereka ke dalam laporan tahunan mereka, yang dilengkapi dengan, atau tanpa menampilkan informasi tersebut dalam situs perusahaan mereka.
- Perusahaan yang menggunakan kerangka kerja GRI sebagai pedoman untuk pelaporan keberlanjutannya, memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menggunakan kerangka kerja lain atau tidak menggunakan kerangka kerja.
- Rata-rata, Perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah (GLC) / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai operasi bisnis mereka, dibandingkan dengan non-GLC/non-BUMN dan memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa keseluruhan keadaan dan kemajuan pelaporan keberlanjutan cukup baik di keempat negara. Meskipun ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut, negara-negara ini telah melakukan upaya tambahan untuk menghasilkan kualitas pelaporan keberlanjutan yang lebih baik setelah studi ini.

¹ Skor ini mewakili tingkat pengungkapan keberlanjutan masing-masing negara, dan jumlahnya berkisar dari minimum 20, sampai maksimum 100

1. PENGANTAR

Pelaporan berkelanjutan semakin mendapat pengakuan dan penghargaan dari negara-negara di ASEAN. Pelaporan ini membentuk komponen inti dari praktik Tanggungjawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh bisnis yang menilai dan mengungkapkan informasi non-keuangan mengenai operasi dan praktik bisnis mereka.

Tren pelaporan berkelanjutan yang muncul dari perusahaan mencerminkan kesadaran mereka tentang manfaat dan kegunaan dari pelaporan tersebut, seperti mendorong perusahaan untuk bersikap transparan mengenai rincian operasi mereka. Hal itu akan mencerminkan komitmen mereka untuk bertanggung jawab dan akuntabel terhadap praktik mereka. Dalam perspektif perusahaan, transparansi ini meningkatkan reputasinya tidak hanya pada para pemangku kepentingan dan konsumennya, namun juga pada pemodal utama, dan para pegawainya. Sebuah perusahaan menjadi lebih sadar akan efisiensi operasionalnya, dan dengan demikian, dapat bekerja untuk meningkatkan upaya keberlanjutan dan kinerja keuangannya.

Selain itu, pengungkapan berkelanjutan dapat menjadi pembeda bagi para pemangku kepentingan yang potensial untuk berinvestasi di perusahaan. Meskipun pelaporan berkelanjutan belum menjadi persyaratan di Singapura, jumlah perusahaan yang menyampaikan tentang keberlanjutan telah tumbuh dengan stabil dari 2011, 2013, dan 2015, sebagaimana mereka menyadari nilai dari melakukan tindakan tersebut.

2. TUJUAN PENELITIAN

Studi tentang pelaporan berkelanjutan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand telah dilakukan, dan dapat diamati bahwa setiap negara memiliki berbagai praktik dan budaya yang dapat mempengaruhi tingkat pelaporan berkelanjutan dan kelengkapan informasi yang diungkapkan. Dengan demikian, bersamaan dengan temuan dari masing-masing studi, tujuan dari laporan ini adalah untuk menyajikan dan meninjau kembali analisis antar negara dari negara-negara yang telah disebutkan di atas di ASEAN.

3. LINGKUP PENELITIAN

Sampel yang digunakan untuk masing-masing negara melibatkan 100 perusahaan *mainboard* terbesar yang terdaftar berdasarkan kapitalisasi pasar per 30 Juni 2015. Penelitian ini berfokus pada 100 perusahaan yang terpilih dari masing-masing negara, yang menyampaikan tentang keberlanjutan dan mencakup informasi yang diungkapkan oleh mereka mulai 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2015.

Ketika perusahaan memilih untuk menyampaikan tentang keberlanjutan, mereka dapat melakukannya dengan menyampaikan praktik keberlanjutan mereka di situs web perusahaan mereka, membuat laporan keberlanjutan tersebut diintegrasikan ke dalam laporan tahunan mereka, sebagai laporan yang berdiri sendiri atau, sebagai kombinasi dari ketiga hal tersebut. Laporan yang berdiri sendiri adalah laporan keberlanjutan ataupun laporan CSR yang merepresentasikan jenis pelaporan keberlanjutan yang lengkap dan komprehensif yang mampu mendorong perusahaan untuk melakukan hal tersebut

4. LANSKAP KEBERLANJUTAN DI ASEAN

Di Indonesia, pengungkapan *CSR* merupakan bagian dari aturan yang diterapkan bagi para emiten dan perusahaan publiknya. Persyaratan dari daftar peraturan ini menetapkan para emiten dan perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi *CSR* terutama pada kinerja lingkungan dan sosial mereka. Persyaratan ini diterapkan sejak tahun buku berakhir, atau setelah 31 Desember 2012. Bursa Malaysia juga telah menerapkan penyusunan mengenai Pernyataan Berkelanjutan sebagai bagian dari persyaratan pencatatan mulai tahun 2007. Selain itu, pada tahun 2015, emiten yang terdaftar diminta untuk menyampaikan sebuah pernyataan naratif mengenai manajemen ekonomi material, upaya lingkungan dan sosial, yang menggantikan pernyataan sederhana mengenai praktik *CSR* mereka.

Hampir sama dengan Indonesia dan Malaysia, pengungkapan *CSR* juga merupakan bagian dari peraturan pencatatan di Thailand. Perusahaan yang terdaftar diwajibkan untuk mengungkapkan praktik *CSR* mereka mengenai pemangku kepentingan, ekonomi, masyarakat dan lingkungan hidup, baik dalam laporan mandiri, maupun pada laporan tahunan mereka. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Sementara itu, pelaporan berkelanjutan belum diwajibkan di Singapura, jika dibandingkan dengan ketiga negara lainnya. Namun, pelaporan ini akan menjadi dasar ‘patuhi atau jelaskan’ (*comply or explain*) sejak tahun buku berakhir, atau setelah 31 Desember 2017, ketika perusahaan terdaftar harus menyiapkan laporan berkelanjutan tahunan yang menjelaskan mengenai praktik keberlanjutannya.

Tabel 1 memberikan ikhtisar mengenai lanskap keberlanjutan di empat negara dan merangkum ketersediaan panduan tertulis laporan berkelanjutan dan indeks keberlanjutan di masing-masing negara. Bursa efek di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, masing-masing dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (IDX), Bursa Malaysia (Bursa), Bursa Efek Singapura (SGX), dan Bursa Efek Thailand (SET).

	Indonesia (IDX)	Malaysia (Bursa)	Singapore (SGX)	Thailand (SET)
Tingkat Penegakan Pelaporan Berkelanjutan	Pengungkapan <i>CSR</i> sebagai bagian dari peraturan yang diterapkan sejak tahun buku berakhir, atau sesudah 31 Desember 2012	Pengungkapan laporan berkelanjutan sebagai aturan pencatatan sejak tahun 2007	Dasar ‘patuhi atau jelaskan’ (<i>Comply or explain</i>) sebagai bagian dari aturan pencatatan sejak tahun buku berakhir, atau setelah 31 Desember 2017	Pengungkapan <i>CSR</i> sebagai bagian dari aturan pencatatan, efektif dari 1 Januari 2014
Petunjuk Tertulis Pelaporan yang Berkelanjutan	Nil	Panduan laporan berkelanjutan bagi Bursa	Panduan laporan berkelanjutan untuk daftar perusahaan bagi SGX	Panduan laporan berkelanjutan bagi CSRI
Indeks Keberlanjutan	Indeks KEHATI-SRI	Indeks Bursa Malaysia FTSE4Good	Indeks Keberlanjutan SGX	Nil

Tabel 1: Lanskap keberlanjutan di ASEAN

5. METODOLOGI

Pada semua penelitian yang telah dilakukan untuk perusahaan, pedoman GRI G4 dan Kode Tata Kelola Perusahaan masing-masing negara diadopsi sebagai acuan untuk kerangka kerja dalam rangka menilai laporan berkelanjutan. Pedoman ini membentuk seperangkat kerangka kerja kuantitatif yang luas dan komprehensif yang secara luas diakui sebagai standar global untuk pelaporan berkelanjutan.

Dalam menilai laporan keberlanjutan, metodologi dibangun di atas metodologi yang telah digunakan dalam studi keberlanjutan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut adalah Laporan Keberlanjutan di Singapura (Thomas & Chin, 2011) dan Akuntabilitas untuk Masa Depan yang Berkelanjutan (Loh, Low, Sim & Thomas, 2014).

i. Menilai Tingkat Pengungkapan Berdasarkan Indikator GRI

Pedoman GRI memberikan penilaian holistik dan komprehensif mengenai masalah keberlanjutan termasuk yang terkait dengan manajemen rantai pasokan dan hak asasi manusia. Kerangka penilaian yang luas diringkas menjadi 23 kriteria, yang kemudian dikelompokkan menjadi empat indikator berikut: Pemerintahan, Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Sosial (Tabel 2). Kedalaman pengungkapan dianalisis melalui pemberian skor mulai dari 1 sampai 5 untuk setiap kriteria. 1 poin diberikan jika tidak ada informasi yang diberikan atau ditentukan untuk kriteria tertentu, sementara 5 poin diberikan jika informasi rinci didukung dengan pengukuran. Total skor di setiap indikator kemudian dikonversi menjadi skor relatif dari 5, untuk menetapkan bobot yang sama pada masing-masing dari keempat indikator. Skor maksimum yang dapat diperoleh perusahaan adalah 20, tetapi dikonversi ke skala 100. Skor yang diperoleh mencerminkan tingkat keterbukaan informasi perusahaan terhadap area penilaian dalam metodologi ini. Tingkat pengungkapan ini juga mencerminkan kualitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan.

Skor masing-masing perusahaan digabungkan untuk menghitung rata-rata negara. Perlu dicatat bahwa metode penilaian ini adalah metode rata-rata (*mean*) kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kelengkapan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, dan tidak mewakili kinerja keberlanjutan yang sebenarnya.

Skor Maksimal = 100	
Pemerintahan	Ekonomi
Pem 1: Kode tata kelola pemerintahan	Ekon 1: Nilai ekonomi yang dihasilkan
Pem 2: Prosedur pemerintahan	Ekon 2: Nilai dan rantai pasokan
Pem 3: Anti korupsi dan Kode etik	Ekon 3: Perubahan iklim – implikasi, risiko, peluang
–	Ekon 4: Investasi pada infrastruktur bisnis non-inti
–	Ekon 5: Manajemen risiko
Lingkungan Hidup	Sosial
LH 1: Energi	Sos 1: Keragaman dan kesempatan yang sama
LH 2: Air	Sos 2: Buruh dan Hubungan industrial
LH 3: Pengelolaan Limbah	Sos 3: Kesehatan dan Keselamatan Kerja
LH 4: Emisi karbon	Sos 4: Pelatihan dan pendidikan
LH 5: Keanekaragaman hayati	Sos 5: Hak asasi manusia
LH 6: Kepatuhan	Sos 6: Keterlibatan masyarakat
LH 7: Penataan barang dan jasa	Sos 7: Tanggung jawab produk
–	Sos 8: Filantropi

Tabel 2: Indikator dalam metodologi penilaian GRI

ii. Pengungkapan Standar Umum

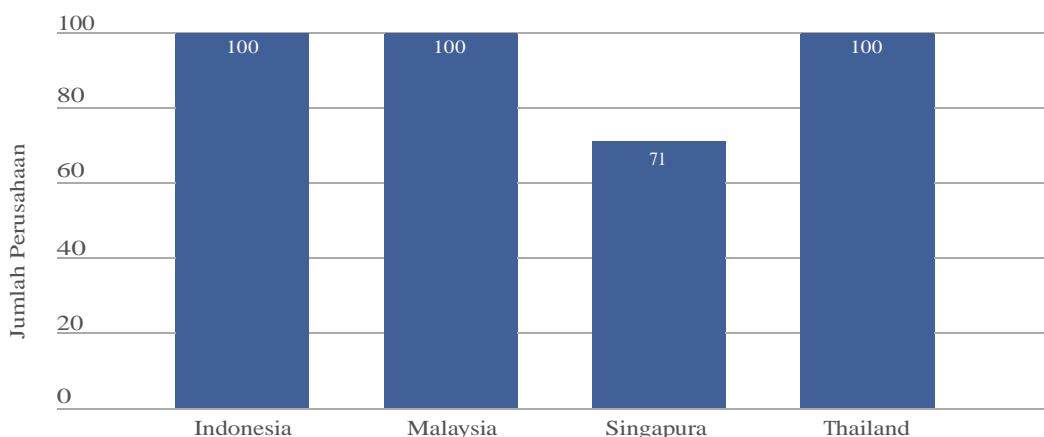
Pengungkapan di tiga bidang lainnya; Strategi dan Analisis, Materialitas dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, juga dilaporkan untuk perusahaan-perusahaan dalam penelitian ini. Pengungkapan standar umum ini berlaku untuk semua perusahaan atau organisasi yang menyiapkan laporan keberlanjutan. Sebanyak delapan kriteria termasuk dalam area ini (Tabel 3) dan masing-masing kriteria dinilai berdasarkan proporsi perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai hal tersebut.

Strategi dan analisa	Materialitas	Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Berikan pernyataan dari pengambil keputusan paling senior dalam organisasi (seperti CEO) tentang relevansi keberlanjutan	Jelaskan proses untuk menentukan isi laporan dan batasan aspek	Kebijakan dan prosedur keterlibatan pemangku kepentingan
Berikan deskripsi mengenai dampak utama, risiko, dan peluang	Cantumkan semua aspek material yang teridentifikasi	Berikan daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi
–	Laporkan batasan aspek untuk setiap aspek material	Laporkan dasar identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan

Tabel 3: Pengungkapan standar umum

6. TEMUAN ANTAR NEGARA

Bagian ini mencakup ikhtisar kinerja pengungkapan keberlanjutan dari keempat negara dan juga menyoroti kekuatan masing-masing negara. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, seluruh 100 perusahaan terpilih di Indonesia, Malaysia dan Thailand telah diamati untuk mengkomunikasikan tentang keberlanjutan. Hal ini terkait dengan sifat wajib pelaporan berkelanjutan di negara-negara ini. Di Singapura, 71 dari 100 perusahaan telah melakukan hal tersebut (Gambar 1), namun proporsi perusahaan yang lebih tinggi diharapkan melakukan pelaporan tersebut saat aturan yang diterapkan yang baru diperkenalkan.



Gambar 1: Jumlah perusahaan yang mengkomunikasikan keberlanjutan

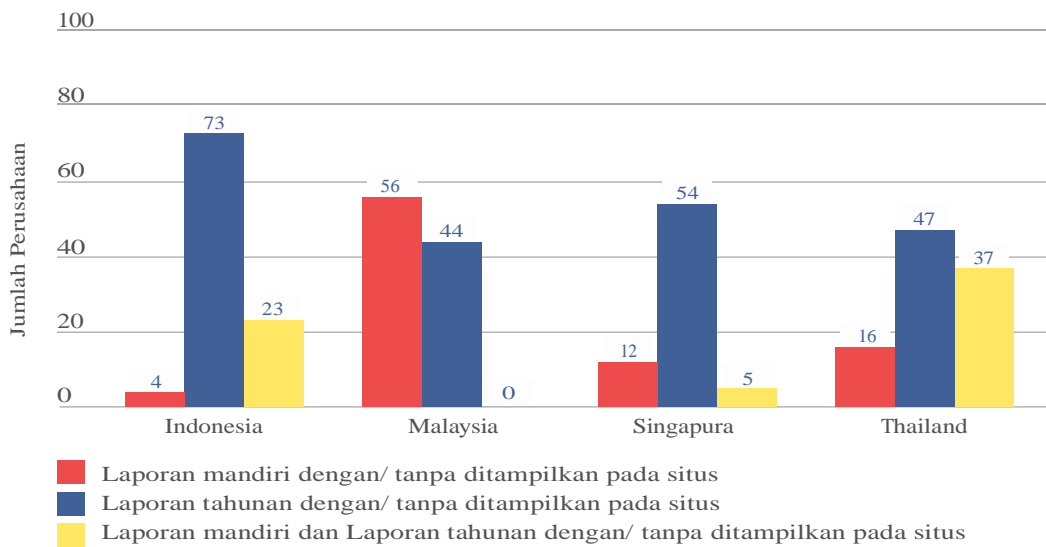
i. Karakteristik laporan

a. Medium untuk menyampaikan tentang keberlanjutan

Perusahaan dapat menyampaikan tentang usaha keberlanjutan mereka melalui beberapa medium. Mereka dapat menyampaikannya dengan mengkomunikasikan praktik keberlanjutan mereka di situs web perusahaan mereka, membuat laporan keberlanjutan mereka diintegrasikan ke dalam laporan tahunan, memiliki laporan yang berdiri sendiri atau, kombinasi dari ketiga hal tersebut. Laporan yang berdiri sendiri bisa berupa laporan keberlanjutan maupun laporan CSR.

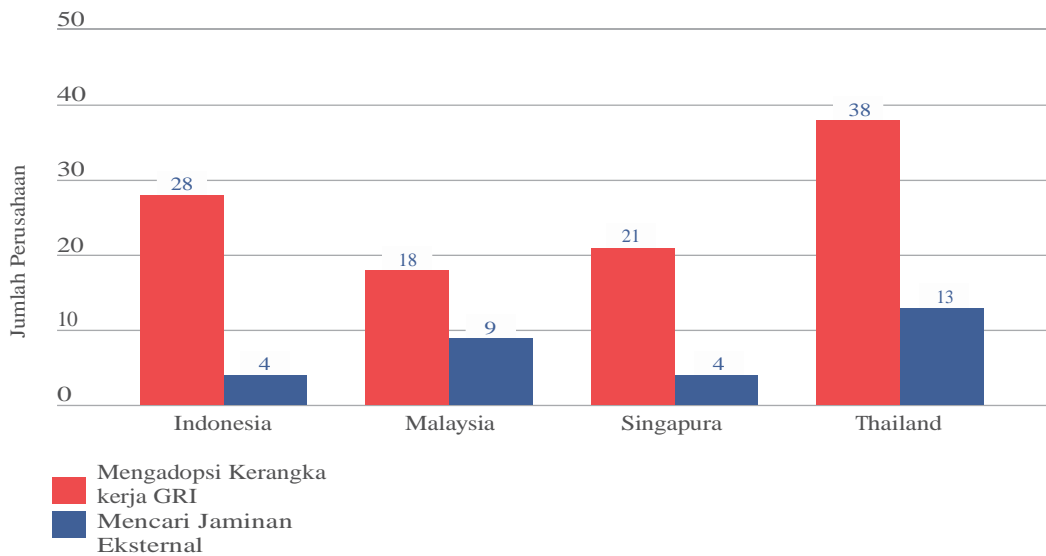
Telah diamati bahwa banyak perusahaan di semua negara, kecuali di Malaysia, mengkomunikasikan praktik keberlanjutan mereka terutama dengan cara mengintegrasikan laporan keberlanjutan mereka ke dalam laporan tahunan. Selain itu, laporan tahunan ini dilengkapi dengan atau tanpa menampilkan informasi tersebut pada situs perusahaan mereka. 73 dari 100 perusahaan di Indonesia, 54 dari 71 di Singapura dan 47 dari 100 di Thailand juga melakukan hal tersebut (Gambar 2). Sisanya mengkomunikasikan keberlanjutan baik dengan memiliki laporan yang berdiri sendiri maupun laporan yang berdiri sendiri dan laporan tahunan.

Sehubungan dengan perusahaan di Malaysia, 56 dari 100 perusahaan yang mengkomunikasikan keberlanjutan menerbitkan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri. Ini merupakan suatu hal yang patut dihargai dari perusahaan Malaysia yang telah bekerja ekstra untuk menghasilkan laporan yang berdiri sendiri, yang menunjukkan antusiasme dan komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Sisanya, yakni 44 perusahaan, mengkomunikasikan keberlanjutan dengan memiliki laporan tahunan terpadu. Demikian pula, laporan ini dilengkapi dengan atau tanpa komunikasi yang berkelanjutan di situs perusahaan-perusahaan.



Gambar 2: Medium untuk mengkomunikasikan keberlanjutan antar negara

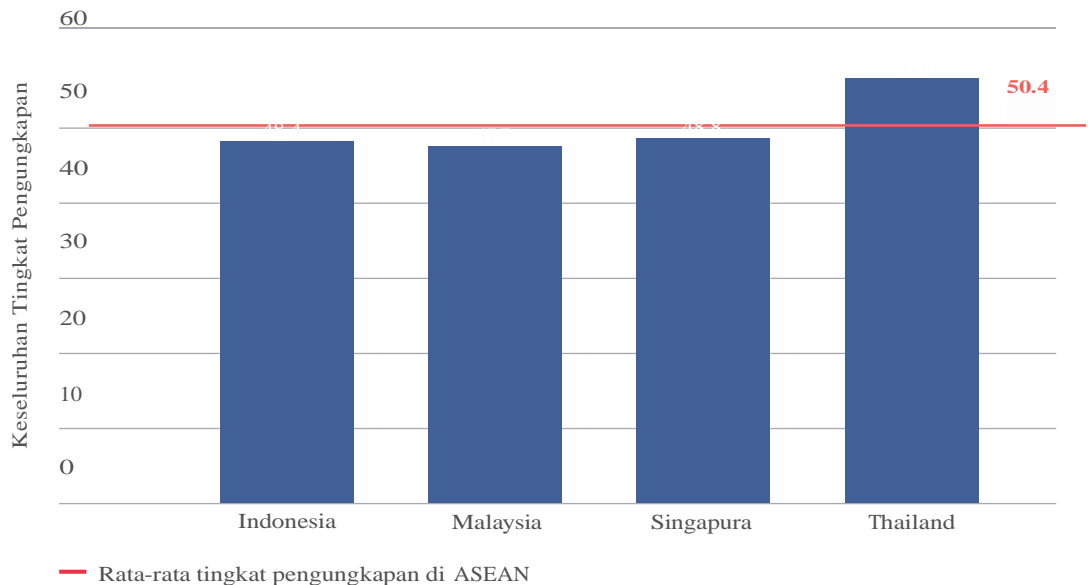
b. Analisa Kerangka kerja



Gambar 3: Jumlah perusahaan yang mengadopsi kerangka kerja GRI dan mencari jaminan eksternal

Dapat dilihat dari Gambar 3 di atas, 28 perusahaan di Indonesia mengadopsi kerangka kerja GRI sebagai pedoman acuan untuk laporan berkelanjutan mereka sementara Malaysia, Singapura dan Thailand masing-masing memiliki 18, 21 dan 38 perusahaan yang melakukan hal tersebut. Perusahaan yang tersisa dari semua negara tersebut mengadopsi kerangka kerja lain, seperti *United Nations Global Compact (UNGC)* atau *Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)*, atau tidak memiliki kerangka kerja sebagai panduan. Selain itu, hanya sebagian kecil perusahaan dari masing-masing negara yang meminta jaminan eksternal dari auditor lain untuk memeriksa laporan keberlanjutannya.

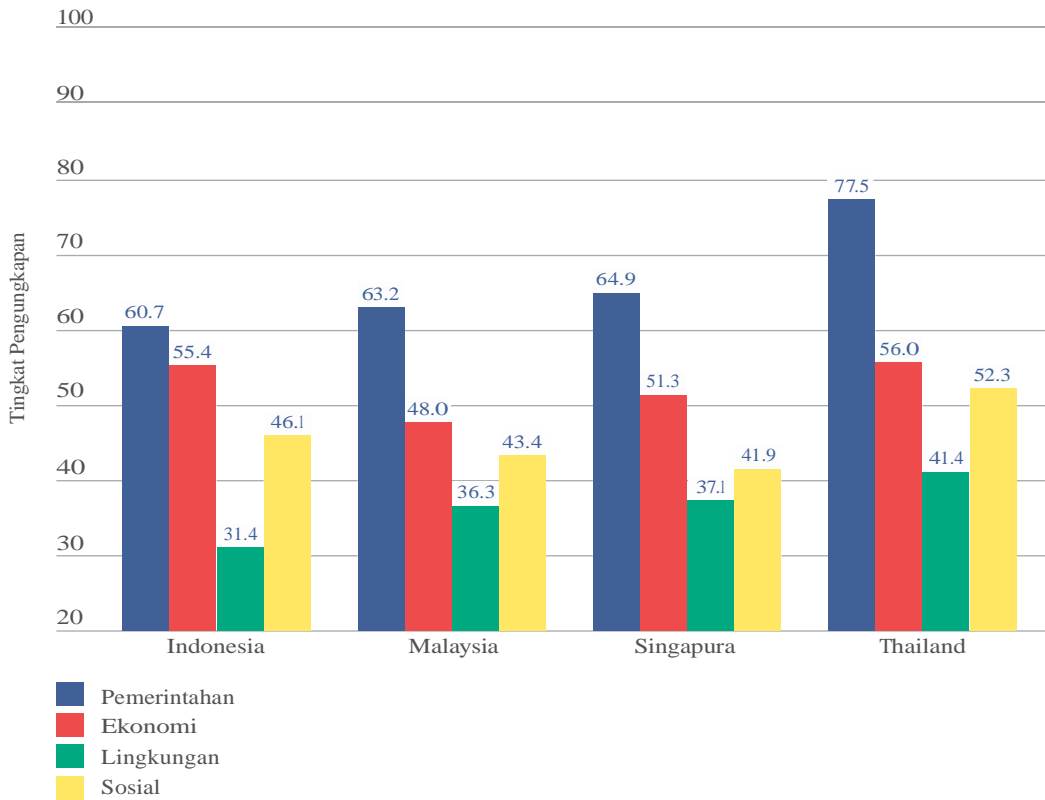
ii. Keseluruhan Tingkat Pengungkapan



Gambar 4: Tingkat pengungkapan di ASEAN

Berdasarkan semua perusahaan yang telah diteliti, di negara-negara ini, rata-rata tingkat pengungkapan untuk pelaporan keberlanjutan di ASEAN adalah 50,4 (Gambar 4). Tingkat pengungkapan ini menunjukkan kualitas pelaporan keberlanjutan yang cukup baik di keempat negara. Thailand memiliki tingkat pengungkapan tertinggi dari perusahaan-perusahaannya dan juga satu-satunya negara yang memiliki tingkat pengungkapan di atas rata-rata di ASEAN. Ini menunjukkan bahwa Thailand memiliki kualitas pengungkapan keberlanjutan tertinggi dan lanskap keberlanjutan yang paling luas, mendahului Singapura, Indonesia dan Malaysia.

iii. Tingkat Pengungkapan berdasarkan Indikator

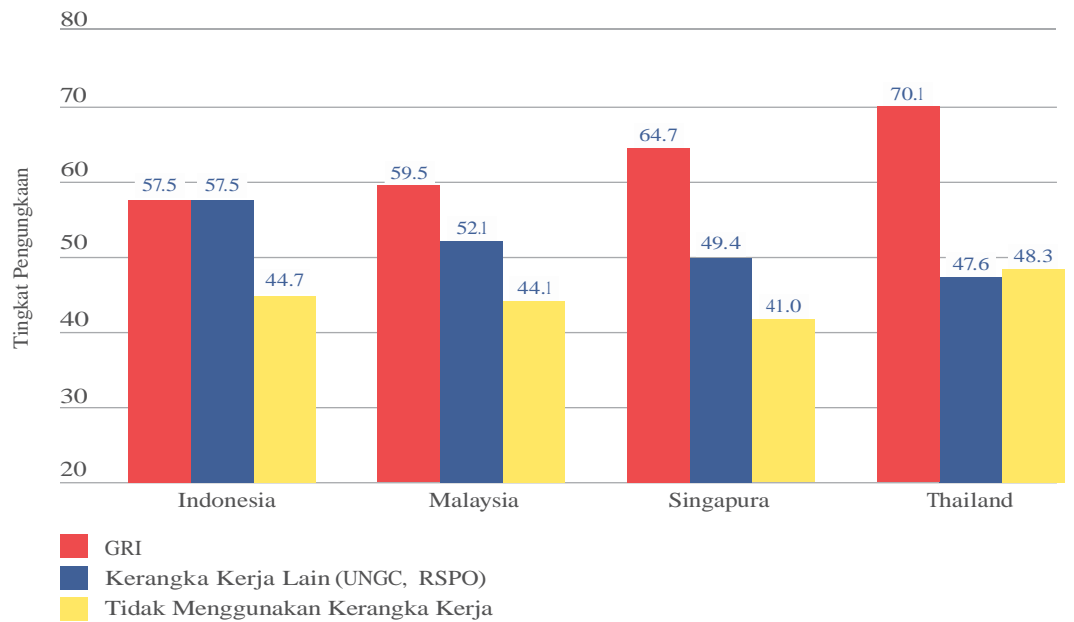


Gambar 5: Tingkat pengungkapan berdasarkan indikator

Dilihat dari indikator-indikator GRI, Thailand memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain untuk semua indikator; Pemerintahan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Sosial (Gambar 5). Ini bisa jadi karena budaya bisnisnya yang sangat menekankan kepatuhan. Beberapa perusahaan (seperti PTT Public Limited Company) memiliki CSR atau pernyataan serupa yang dimasukkan ke dalam misi dan nilai perusahaan mereka bahkan sejak awal perusahaan tersebut didirikan (Srisuphaolarn, 2011).

Keempat negara tersebut juga diamati mengikuti tren yang sama, yakni memiliki tingkat pengungkapan terendah pada indikator lingkungan hidup. Perkembangan ekonomi pada umumnya menimbulkan dampak lingkungan, dan ketika perusahaan tidak mau mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai dampak bisnisnya terhadap lingkungan hidup, atau upaya yang sesuai untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan hidup, hal-hal tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya usaha mereka, yang nantinya akan mencerminkan reputasi mereka secara negatif.

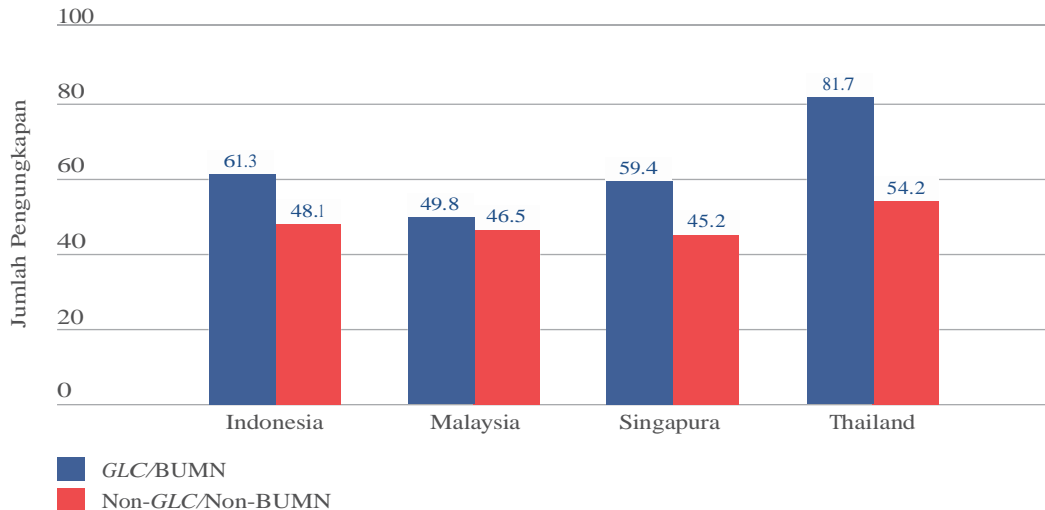
iv. Tingkat Pengungkapan berdasarkan Kerangka Kerja



Gambar 6: Tingkat pengungkapan berdasarkan kerangka kerja

GRI menyediakan kerangka kerja yang komprehensif bagi perusahaan untuk memahami dan mengkomunikasikan tentang pemerintah, ekonomi, kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial, serta pengaruh perusahaan tersebut. Perusahaan yang mengadopsi kerangka kerja GRI diamati memiliki tingkat keterbukaan yang lebih tinggi daripada perusahaan yang mengadopsi kerangka kerja lain atau tidak menggunakan kerangka kerja (Gambar 6). Hasil ini konsisten di semua negara, kecuali Indonesia. Di Indonesia, perusahaan yang mengadopsi kerangka kerja GRI memiliki tingkat keterbukaan yang sama dengan mereka yang mengadopsi kerangka kerja lainnya. Namun, hanya 1 dari 100 perusahaan yang menggunakan kerangka kerja lainnya sebagai satu-satunya pedoman laporan keberlanjutannya. Oleh karena itu, tingkat pengungkapan dari perusahaan ini tidak dapat mewakili referensi dari kerangka kerja lainnya.

v. **Tingkat Pengungkapan oleh Perusahaan yang berafiliasi dengan Pemerintah (GLCs)/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**



Gambar 7: Tingkat pengungkapan oleh GLC/BUMN dan non-GLC/non-BUMN

Perusahaan didefinisikan sebagai Perusahaan yang Berafiliasi dengan Pemerintah (GLC) atau seringkali dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jika pemerintah memiliki pemilikan saham sebesar 20% atau lebih dalam usaha tersebut. Berdasarkan studi yang dilakukan, GLC di keempat negara mengungkapkan lebih banyak informasi tentang praktik keberlanjutan mereka daripada rekan kerja non-GLC mereka, dan karenanya, menghasilkan tingkat pengungkapan yang lebih tinggi (Gambar 7). Karena globalisasi mempengaruhi berbagai perusahaan GLC di seluruh dunia, mereka cenderung lebih transparan dalam praktik mereka dan dengan demikian, mereka mengungkapkan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan non-GLC.

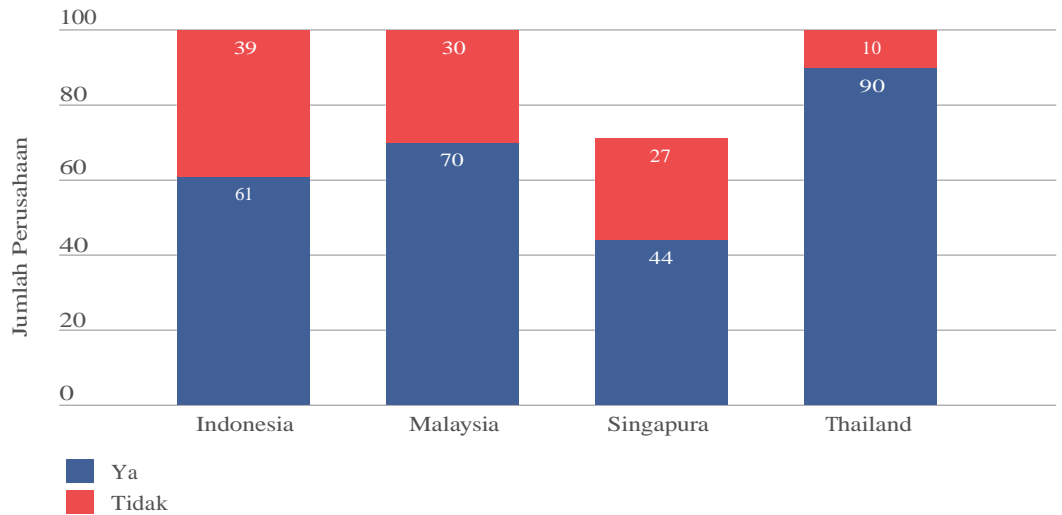
vi. **Pengungkapan Standar Umum**

Pengungkapan standar umum dari perusahaan bertujuan untuk memberikan wawasan tentang topik keberlanjutan, di luar hanya meringkas laporan. Pengungkapan tersebut dinilai oleh beberapa perusahaan di setiap negara yang mengungkapkan informasi sehubungan dengan tiga bidang: Strategi dan Analisis, Materialitas, dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan.

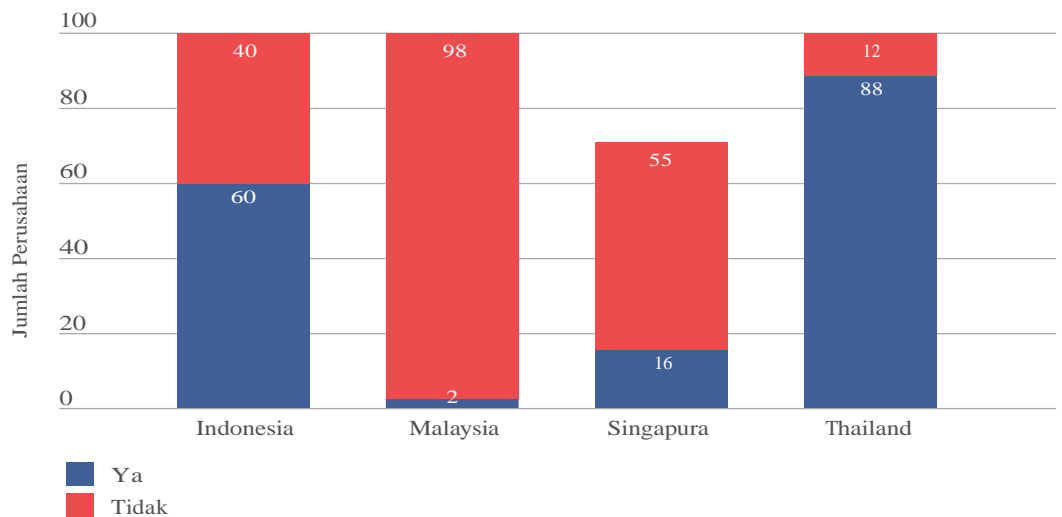
a. **Strategi dan Analisis**

Strategi dan analisis memberikan wawasan strategis secara umum mengenai keberlanjutan perusahaan dan melihat dua aspek. Aspek pertama mengkaji apakah perusahaan tersebut memberikan pernyataan tentang relevansi dari keberlanjutan terhadap perusahaan. Pernyataan semacam itu harus dibuat dari pengambil keputusan paling senior di perusahaan (misalnya CEO) dan harus mencakup strategi masing-masing perusahaan untuk menyampaikan keberlanjutan. Aspek kedua mengkaji tentang apakah mereka juga memberikan deskripsi dan mengidentifikasi dampak utama, risiko dan peluang keberlanjutan.

Perusahaan di Indonesia dan Thailand memiliki pengungkapan yang relatif lebih luas berkaitan dengan pandangan strategis mereka mengenai keberlanjutan. Sebagian besar perusahaan dari negara-negara ini menangani kedua aspek tersebut (Gambar 8). Namun, Singapura dan Malaysia memiliki perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang membuat pernyataan CEO *versus* Perusahaan yang melangkah lebih jauh dan mengidentifikasi risiko utama, dampak dan peluang keberlanjutan. Perbedaan tersebut menyiratkan bahwa ketika perusahaan menyampaikan mengenai relevansi dan pentingnya keberlanjutan, hal tersebut hanya dapat dilakukan pada komitmen yang dangkal, sebagaimana tercermin dari semakin banyaknya jumlah pernyataan CEO yang diberikan, namun justru jumlah perusahaan yang mengenali dampak utama, risiko dan peluang lebih rendah (Gambar 9).



Gambar 8: Jumlah perusahaan yang memberikan pernyataan CEO terkait relevansi keberlanjutan

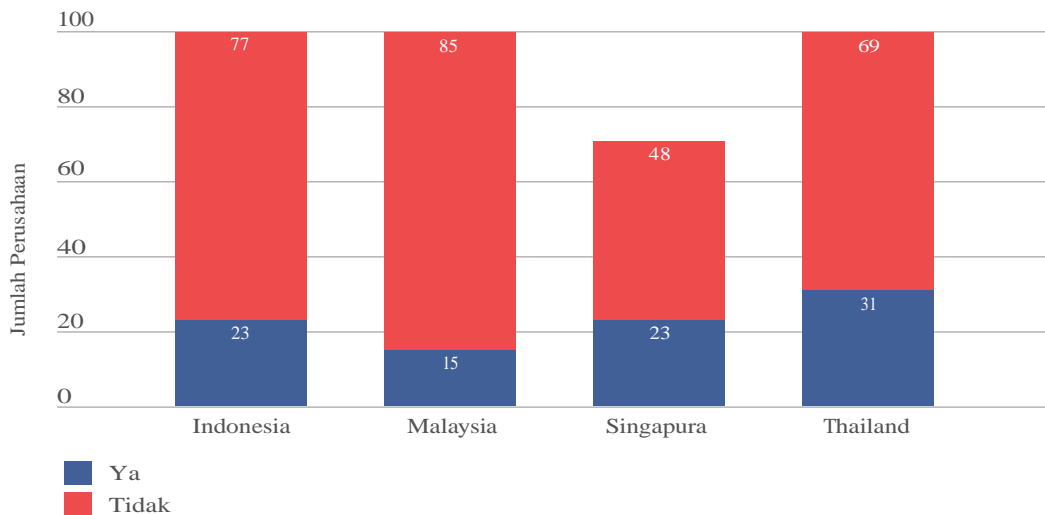


Gambar 9: Jumlah perusahaan yang memberikan deskripsi tentang dampak utama, risiko, dan peluang

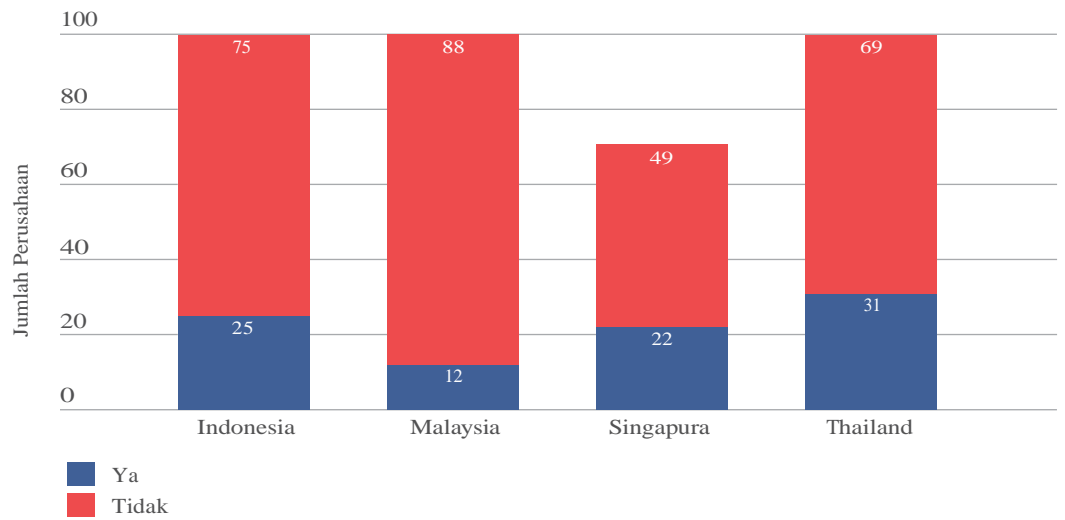
b. Materialitas

Pengungkapan standar ini melihat topik yang dianggap oleh perusahaan sebagai bahan untuk bisnis mereka, yaitu pada saat mereka menyadari bahwa beberapa informasi tentang operasi mereka penting bagi calon investor yang membuat keputusan untuk berinvestasi. Perusahaan dipelajari berdasarkan tiga kriteria: apakah mereka menjelaskan proses untuk menentukan isi laporan dan batasan aspek, mencantumkan aspek material yang diidentifikasi, dan apakah mereka melaporkan batasan aspek untuk setiap aspek material di dalam dan di luar organisasi.

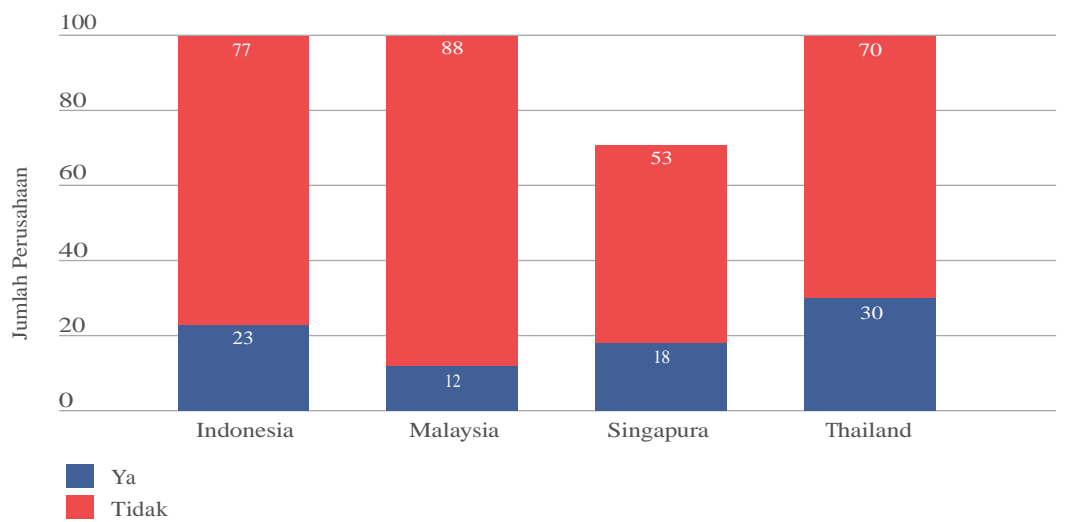
Di keempat negara, hanya sebagian kecil negara yang mengungkapkan informasi tentang ketiga kriteria materialitas tersebut (Gambar 10-12). Mengabaikan informasi material dari laporan keberlanjutan dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat investor atas dasar informasi keuangan. Oleh karena itu, pengungkapan secara menyeluruh mengenai apa yang dianggap penting oleh perusahaan terhadap bisnis mereka dapat ditingkatkan untuk membantu pemangku kepentingan mereka saat ini dan pemangku kepentingan yang potensial dalam mengambil keputusan. Sedangkan bagi mereka yang mengungkapkan secara menyeluruh, isu material yang paling banyak dikutip di keempat negara berada di bawah indikator sosial dan merupakan isu yang berkaitan dengan Pekerjaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta Pelatihan dan Pendidikan.



Gambar 10: Jumlah perusahaan yang menjelaskan proses untuk menentukan isi laporan dan batasan aspek



Gambar 11: Jumlah perusahaan yang mencantumkan aspek material yang teridentifikasi

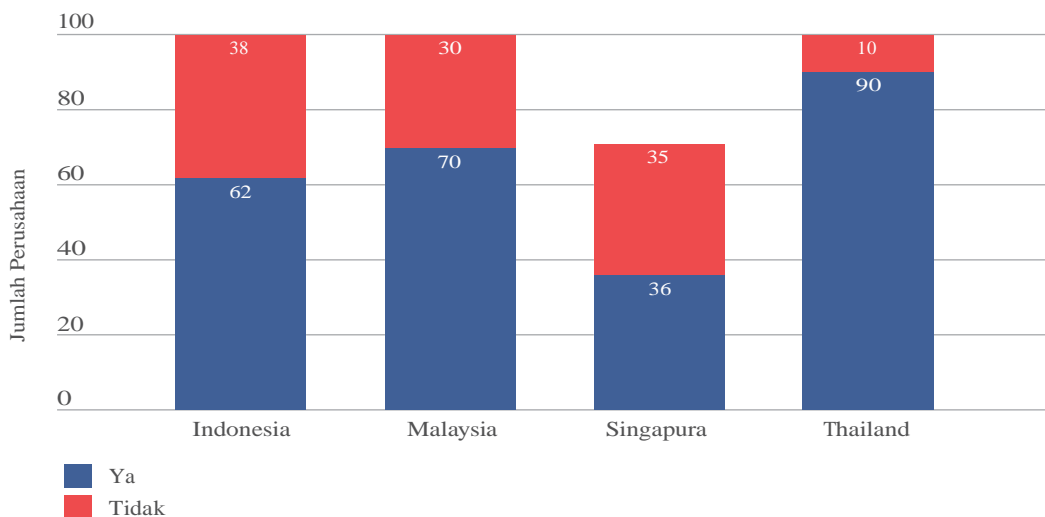


Gambar 12: Jumlah perusahaan yang melaporkan batasan aspek untuk setiap aspek material di dalam dan di luar organisasi

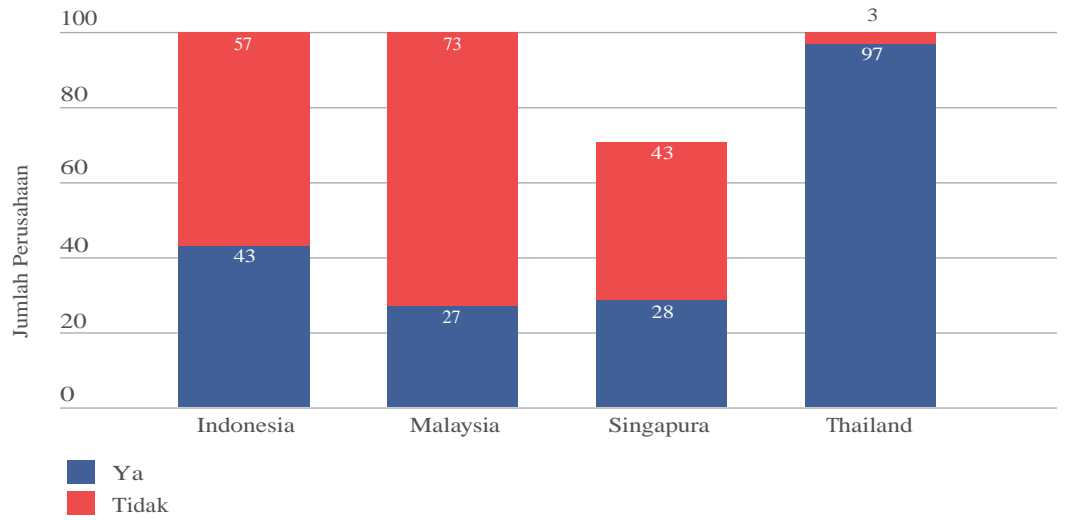
c. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pengungkapan di bidang ini memberikan gambaran umum mengenai keterlibatan perusahaan dengan pemangku kepentingannya selama atau di luar periode pelaporan keberlanjutan. Pengungkapan tersebut menyampaikan informasi tentang bagaimana pemangku kepentingan perusahaan dipilih dan disertakan dalam operasi bisnisnya. Perusahaan dinilai berdasarkan tiga aspek: pengungkapan keterlibatan pemangku kepentingan, kebijakan inklusivitas, serta prosedur, apakah mereka menyediakan daftar kelompok pemangku kepentingan yang terkait dengan mereka dan apakah mereka melaporkan dasar untuk identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan.

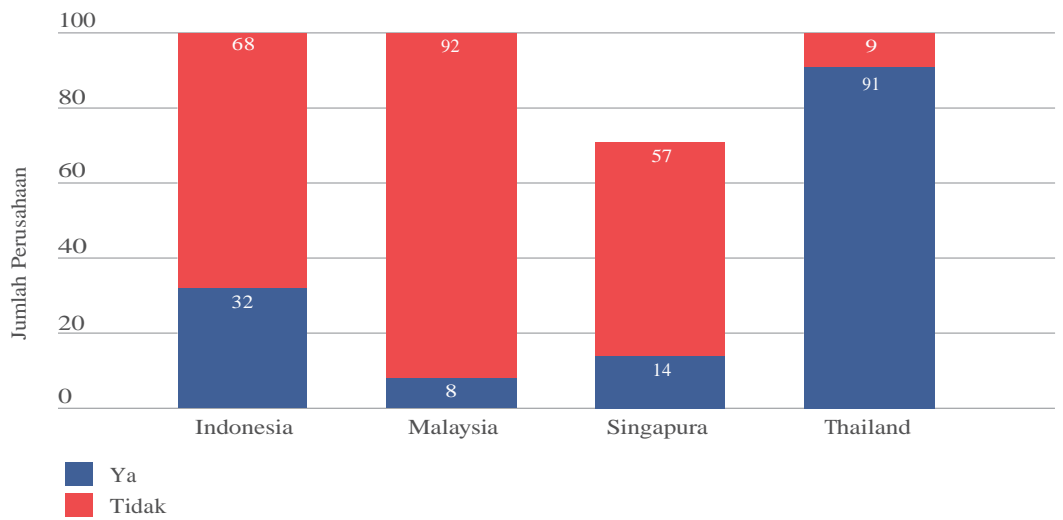
Proporsi perusahaan yang memiliki pengungkapan yang berkaitan dengan pemangku kepentingan paling banyak terdapat di Thailand. Selain itu, Thailand juga memiliki jumlah perusahaan tertinggi yang mengkomunikasikan keberlanjutan pada ketiga aspek di atas. Sebagai perbandingan, Indonesia memiliki proporsi perusahaan yang moderat yang melakukan hal tersebut, dengan lebih dari setengahnya mengungkapkan informasi mengenai kebijakan dan prosedur terkait. Sebagian besar dari mereka juga mendaftarkan kelompok pemangku kepentingan untuk terlibat dan melaporkan dasar pemilihan pemangku kepentingan mereka. Malaysia, di sisi lain, memiliki 8 dari 100 perusahaan yang melaporkan dasar identifikasi dan seleksi pemangku kepentingan perusahaannya (Gambar 13-15). Demikian juga, perusahaan di Singapura bisa lebih transparan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pemangku kepentingan mereka.



Gambar 13: Jumlah perusahaan yang mengungkapkan kebijakan dan prosedur keterlibatan pemangku kepentingan



Gambar 14: Jumlah perusahaan yang menyediakan daftar kelompok pemangku kepentingan yang terlibat



Gambar 15: Jumlah perusahaan yang melaporkan dasar identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan

7. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan.

Pertama, penelitian ini merupakan studi pelopor yang telah dilakukan untuk pelaporan keberlanjutan pada empat negara di ASEAN. Penelitian di Indonesia, Malaysia dan Thailand juga dilakukan untuk pertama kalinya, sementara untuk Singapura, studi ini adalah studi ketiga yang dilakukan di perusahaan-perusahaan *mainboard* Singapura. Dengan kurangnya studi arsip dari tiga negara lainnya, satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan untuk melacak dan menganalisis kemajuan pelaporan keberlanjutan di ASEAN. Dengan memiliki data tentang lanskap dan tingkat keterbukaan berkelanjutan dari masing-masing negara dari tahun ke tahun, pengembangan pelaporan keberlanjutan di setiap negara dan di seluruh ASEAN dapat diamati.

Kedua, penelitian ini hanya melihat laporan tahunan perusahaan / laporan keberlanjutan atau situs perusahaan mereka di mana upaya keberlanjutan dikomunikasikan. Namun, pengungkapan ini tidak selalu mewakili kinerja aktual perusahaan. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memasukan kunjungan lapangan atau proses validasi lainnya untuk mendapatkan penilaian holistik.

Meskipun demikian, studi ini berfungsi sebagai patokan dan memotivasi penelitian lebih lanjut dan studi di masa yang akan datang untuk masing-masing negara. Idealnya, negara lain seperti Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina dan Vietnam dapat disertakan untuk pelaporan keberlanjutan yang lebih komprehensif dan lengkap di ASEAN.

8. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, telah diamati bahwa indikator Ekonomi dan Sosial di Indonesia cukup terungkap dengan baik namun perlu dikaji lebih lanjut mengenai aspek Pemerintahan dan Lingkungan Hidupnya. Sedangkan untuk Malaysia, lanskap pelaporan keberlanjutan yang lebih komprehensif dapat diantisipasi dengan Panduan Pelaporan Keberlanjutan yang baru dilaksanakan oleh Bursa. Demikian pula, proporsi yang lebih tinggi dari perusahaan yang mengkomunikasikan keberlanjutan di Singapura juga diharapkan ketika mengacu pada dasar ‘patuhi atau jelaskan’ (*comply or explain*) dari tahun buku berakhir, atau setelah 31 Desember 2017. Terakhir, Thailand diamati memiliki kualitas pengungkapan keberlanjutan tertinggi, yang sebagian besar disebabkan oleh budaya bisnisnya yang sangat menekankan kepatuhan.

Secara keseluruhan di keempat negara, kualitas pengungkapan yang lebih tinggi umumnya diamati ketika perusahaan mengadopsi kerangka kerja GRI daripada kerangka kerja lainnya, atau tidak memiliki kerangka kerja. Karena pedoman GRI memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan jelas untuk dipahami perusahaan, oleh karena itu lebih mudah bagi mereka untuk mengkomunikasikan praktik keberlanjutan mereka. GLCs / BUMN juga cenderung lebih mengutamakan kualitas pengungkapannya, dibandingkan dengan non-GLC / non BUMN. Peningkatan kualitas pengungkapan GLC / BUMN dapat dikaitkan dengan hubungan dengan pemerintah, di mana ada kebutuhan yang lebih besar untuk transparansi tindakan dan operasinya. Selain itu, ditemukan bahwa hanya sebagian kecil perusahaan di semua negara yang mengungkapkan informasi tentang materialitas. Dengan demikian, kualitas pengungkapan pada pengungkapan standar umum ini dapat ditingkatkan untuk membantu pemangku kepentingan mereka saat ini dan di masa depan dalam mengambil keputusan yang tepat.

Intinya, pelaporan berkelanjutan merupakan bagian integral dari bisnis perusahaan karena memungkinkan mereka mengelola dampak lingkungan dan sosial mereka serta meningkatkan efisiensi operasi mereka. Hal ini mencerminkan reputasi dan praktik perusahaan terhadap konsumen, karyawannya dan juga pemangku kepentingan saat ini dan yang potensial. Hal ini diperlukan untuk menilai kredibilitas dan nilai seseorang dan mempromosikan loyalitas merek.

Sebagai pernyataan terakhir, keseluruhan kualitas pengungkapan masing-masing negara, direpresentasikan oleh tingkatannya masing-masing, cukup sehat. Perusahaan juga tampaknya semakin menyadari pentingnya laporan keberlanjutan dan membuat kemajuan untuk memperbaiki kualitas pengungkapan mereka.

REFERENSI

Amran, A., & Keat Ooi, S. (2014). Sustainability reporting: Meeting stakeholder demands. *Strategic Direction*, 30(7), 38-41. doi:10.1108/SD-03-2014-0035

Global Reporting Initiative (2015). G4 Sustainability Reporting Guidelines. Diambil dari <https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx>

Loh, L., Low, B., Sim, I., & Thomas, T. (2014). Accountability for a Sustainable Future. Sustainability Reporting in Singapore among Singapore Exchange Mainboard Listed Companies 2013. Diambil dari <http://www.csrsingapore.org/c/resources/publications?download=69:accountability-for-a-sustainable-future>

Monetary Authority of Singapore and Singapore Exchange (2012). Code of Corporate Governance. Diambil dari http://www.mas.gov.sg/~media/resource/fin_development/corporate_governance/CGCRevisedCodeofCorporateGovernance3May2012.pdf

Monetary Authority of Singapore and Singapore Exchange (2011). Guide to Sustainability Reporting for Listed Companies. Diambil dari http://rulebook.sgx.com/net_file_store/new_rulebooks/s/g/SGX_Sustainability_Reporting_Guide_and_Policy_Statement_2011.pdf

Srisuphaolarn, P. (2013). From altruistic to strategic CSR: How social value affected CSR development - a case study of Thailand. *Social Responsibility Journal*, 9(1), 56-77. doi:10.1108/17471111311307813

Thomas, T., & Chin, H. (2011). Sustainability Reporting in Singapore. Non-Financial Reporting Among Mainboard Listed Companies in Singapore: A View of the Sustainability Reporting Landscape in 2010-2011. Diambil dari <http://www.csrsingapore.org/c/resources/publications?download=43:sustainability-reporting-in-singapore-non-financial-reporting-among-mainboard-listed-companies-in-singapore>

PENULIS

Dr Lawrence Loh, Director, Centre for Governance, Institutions and Organisations & Deputy Head and Associate Professor, Department of Strategy and Policy, NUS Business School, National University of Singapore

Ms Nguyen Thi Phuong Thao, Programme Manager, ASEAN CSR Network

Dr Isabel Sim, Senior Research Fellow, Department of Social Work, Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore & Research Adviser to ASEAN CSR Network

Mr Thomas Thomas, Chief Executive Officer, ASEAN CSR Network

Ms Wang Yu, Research Associate, Centre for Governance, Institutions and Organisations, NUS Business School, National University of Singapore

PENGHARGAAN

Proyek ini dapat terlaksana dengan kontribusi dari:

Donor



SWEDEN

ASEAN CSR Network

Mr Jerry Bernas
Ms Melissa Chong
Ms Angeline Kwong
Ms Angela Tan
Mr Zatan Tan
Ms Ester Tjahjadi

Centre for Governance, Institutions and Organisations

Staf

Mr Muhammad Ibrahim
Ms Mai Huong Nguyen
Ms Linh Thuy Nguyen
Ms Verity Thoi
Ms Jamilah Ramli

Pemegang/Mahasiswa yang menjadi asisten peneliti

Ms Siti Nurbuwah binte Ismail
Mr Koh Luwen
Ms Yam Jia Hui
Mr Kendrick O'Keefe

Mahasiswa Sekolah Bisnis NUS

Ms Ang Shuang Shuang
Ms Bak Ke Yun Geraldine
Mr Chew You Jing Nicholas
Mr Christopher Michael Law
Mr Keh Zhao Hui
Ms Koh Hui Wen Michelle
Ms Kwa Yi Ting
Ms Lam Wen Yan Jane
Mr Li Yan
Ms Liu Jun Yao
Ms Michelle Ngu Shien Enn
Ms Ng Lin Kai
Ms Rachael Tiong Hui Min
Ms Shen Le
Ms Wang Minwei
Ms Yeo Qian Yee Rachel
Ms Zhang Jieyuan

Published by the ASEAN CSR Network

This study is a part of the ASEAN CSR Vision 2020 – an initiative by the ASEAN CSR Network supported by the Government of Sweden through its Embassy in Bangkok.

This report is printed on environmentally friendly paper.